

MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Muhammad Fadhil Mirsyad

NPP. 30.0308

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: fadil.mirsyad@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The forest and land fire disaster that occurred in East Tanjung Jabung Regency was caused by a high level of drought during the dry season and most of the East Tanjung Jabung Regency area was dominated by peatlands. To fulfill the interests of the community or companies, they often clear land by burning it so that it spreads and causes forest and land fires.* **Purpose:** *This study aims to find out how the mitigation is carried out by the East Tanjung Jabung Regency Regional Disaster Management Agency in forest and land fire disasters..* **Method:** *The research method used is a qualitative research method and data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion.* **Result:** *Based on the results of observations and research that has been carried out, the mitigation of forest and land fires carried out by the East Tanjung Jabung Regency Regional Disaster Management Agency has been going quite well but has not been optimal, this is due to several inhibiting factors such as the lack of budget allocations for prevention and mitigation, limited facilities and infrastructure, and lack of public awareness in disaster emergency response efforts.* **Conclusion:** *the researchers suggest to the East Tanjung Jabung Regency Regional Disaster Management Agency be able to propose additional budgets for the prevention and mitigation process, complete facilities and infrastructure that are still lacking and always be active in socializing and inviting the community to participate in activities disaster management.*

Keywords: *Mitigation, Forest and Land Fires, BPBD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan karena tingkat kekeringan yang tinggi pada musim kemarau dan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dominasi oleh lahan gambut. Demi memenuhi kepentingan masyarakat atau perusahaan, seringkali mereka membuka lahan dengan cara dibakar sehingga meluas dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bencana kebakaran

hutan dan lahan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kurangnya alokasi anggaran pada pencegahan dan mitigasi, keterbatasan kelengkapan sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya tanggap darurat bencana. **Kesimpulan:** maka peneliti menyarankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu mengajukan penambahan anggaran pada proses pencegahan dan mitigasi, melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang dan selalu giat melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kata kunci: Mitigasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Musim kemarau di wilayah Indonesia menyebabkan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia dan negara-negara yang mengelilingi Indonesia. Kebakaran hutan ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia, namun sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh keinginan untuk segera membersihkan lahan dari vegetasinya. Komponen manusia dalam pembukaan lahan yang tidak membutuhkan biaya yang besar menjadi penyebabnya.

Kebakaran terjadi di Provinsi Jambi dapat dikategorikan cukup hutan yang signifikan. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terdampak. Di Provinsi Jambi, besarnya tutupan hutan berbanding lurus dengan tingginya peluang kebakaran hutan, menurut statistik (SiPongi+ periode 2017 hingga 2022)

Pada tahun 2019 merupakan puncak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dengan total 56.592 Ha daerah yang terbakar dengan 14,129 Ha pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari total 203.921 Ha hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peristiwa kebakaran hutan ini juga menyebabkan meningkatnya polusi udara dan pengurangan jarak pandang di Provinsi Jambi yang menyebabkan masyarakat Provinsi Jambi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA). Salah satu kabupaten yang terdampak kebakaran hutan yang cukup luas dan polusi udara yang cukup tebal adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan sebagai respon atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pasal 7(f) peraturan ini mengamanatkan perlunya pengembangan teknik dan prosedur pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemadaman kebakaran lahan, serta perawatan, penyelamatan, pengelolaan dampak, dan pemulihan lingkungan, semuanya merupakan aspek dari pemadaman kebakaran lahan.

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Tanjung Jabung Timur sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen kebencanaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kerusakan ekosistem yang begitu masif dan pencemaran udara akibat kebakaran hutan menjadi penyebab utama mengapa penerapan program mitigasi harus dilaksanakan secara maksimal, hal ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan warga negara, dalam hal ini BPBD diharuskan dapat menyusun program-program mitigasi bencana sebagai aktualisasi dari Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, Berdasarkan Kajian resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperoleh rekomendasi program mitigasi kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

Rekomendasi Program Mitigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 1 Melakukan pengawasan di kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan karena terdapat titik api di sana.
- 2 Mendirikan waduk penampung air di daerah yang rawan atau memiliki kemungkinan besar terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, harus dilengkapi dengan pompa untuk memadamkan api.
- 3 Membangun sekat-sekat di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan dan kanal-kanal di daerah yang rawan kebakaran perkebunan agar jika terjadi kebakaran tidak menyebar.
- 4 Peningkatan jumlah pemadam kebakaran yang diawaki oleh petugas pemadam kebakaran yang berkualitas
- 5 Menghimbau kepada masyarakat luas untuk tidak membuang sampah sembarangan pada puntung rokok yang terbakar.
- 6 Jika seseorang dinyatakan bersalah karena menyalakan api di hutan atau di tanah, mereka harus dihukum berat sesuai dengan hukum.

Berdasarkan rekomendasi diatas terdapat beberapa rekomendasi program mitigasi yang akan diterapkan untuk pengurangan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rekomendasi program tersebut menambah beberapa rancangan program dan juga mendukung program program sebelumnya seperti penerapan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan pembuatan beberapa titik sumur darurat untuk mempermudah pemadaman hingga bantuan helikopter untuk pemadaman dan monitoring kebakaran hutan dan lahan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti masalah alokasi dana dan kelengkapan sarana dan prasarana

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks mitigasi bencana ataupun deteksi dini dalam bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Siti Hazar Sitorus dan Rahmat Hidayat dengan judul “Strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat di sungai pakning kabupaten bengkalis provinsi riau” menerapkan strategi peningkatan kapasitas masyarakat dengan cara berkerja sama dengan pihak lain yaitu PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dengan membentuk Forum Tukar Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai hub pertukaran MPA tingkat kabupaten, meningkatkan inovasi sumur hidran, membangun waduk penampungan air dan memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong untuk kebun nanas dan kebun raya gambut (Sitorus & Hidayat, 2020). Penelitian Ari Sandhyavitri, Rizki Sahputra, Sigit Sutikno, dengan judul “Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Berdasarkan Metode Network Analysis Berbasis Gis (Studi Kasus: Pulau Bengkalis) menemukan bahwa waktu

tempuh dari pos pemadam kebakaran ke area-area berpotensi bencana kebakaran hutan dan hasil dari penelitian ini adalah data yang menunjukkan bahwa dengan penambahan pos pemadam kebakaran di titik tertentu mampu mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh ke daerah-daerah berpotensi bencana kebakaran hutan dan lahan dan mempercepat respon terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat diatasi secepat mungkin. Penelitian Astuti selanjutnya berkaitan dengan kiprah komunitas masyarakat dalam memberdayakan (Rizki Sahputra, Sigit Sutikno, 2017), Penelitian Kushartati Budiningsih, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. Menemukan bahwa kinerja yang dihasilkan dari koordinasi antar instansi pemerintah kurang baik dalam pemenuhan target pemadaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka pemadaman kebakaran. Otoritas, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi koordinasi (Budiningsih, 2017). Penelitian Rosalina Kumalawati, Nasruddin, dan Elisabeth, dengan judul "Strategi Penanganan Hotspot Untuk Mencegah Kebakaran Di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan". Menemukan beberapa strategi tepat yang dapat dikatakan sangat efektif dalam mencegah kebakaran.

Strategi tersebut meliputi peningkatan fasilitas tanggap kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, penguatan model kerja dalam masyarakat, peningkatan alokasi dan pengelolaan dana kesiapsiagaan bencana, dan peningkatan jumlah petugas pemadam kebakaran yang dilatih untuk tanggap kebakaran hutan. Dimungkinkan untuk menawarkan alat pemadam kebakaran kepada masyarakat sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan upaya pencegahan kebakaran seperti penyuluhan, pemantauan, dan patroli, serta dengan melibatkan masyarakat (Kumalawati et al., 2019). Penelitian Linda Handayani Dan Rustan, dengan judul "Analisis Distribusi Suhu Maksimum Dan Kelembaban Rata-Rata Untuk Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus: Kabupaten Muaro Jambi)". Mengemukakan bahwa bulan September 2019 mengalami suhu maksimum tertinggi berkisar antara 33,5 °C hingga 36 °C, dan kelembaban rata-rata terendah berkisar antara sekitar 62 persen hingga 72%. Selain itu, Kabupaten Muaro Jambi mengalami jumlah titik panas tertinggi selama bulan ini. Menurut bukti ini, kondisi suhu tinggi dan kelembaban rendah lebih mungkin mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. (Handayani & Rustan, 2020)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan Research Gap sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada cara yang dilakukan untuk menemukan sumber api atau Hotspot dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencegah dan mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan.

1.5. Tujuan.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

II. METODE

Dalam penelitian khusus ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif yang dilakukan melalui metodologi kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak dalam bentuk digital melainkan berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, catatan memo, berkas pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, karena dipergunakan untuk meneliti berdasarkan kondisi obyek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dikerjakan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan definisi dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2020)

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 6 orang dan masyarakat dari 4 kecamatan yang memiliki potensi kebakaran hutan tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 4 orang.

Sugiyono menyampaikan bahwa teknik analisis data ialah aktivitas dalam analisis data kualitatif dikerjakan langsung secara rutin dan interaktif, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013). Kegiatan analisis data yakni sebagai berikut: Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

1. Sosialisasi

Upaya sosialisasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah pernah dilakukan namun sempat terhenti dikarenakan pandemi Covid-19 membatasi ruang kumpul untuk sosialisasi dan alokasi anggaran lebih diprioritaskan ke arah penanganan Covid-19 dengan data berkurangnya jumlah lahan yang terbakar semenjak 2019.

Pada sesi wawancara peneliti saat melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu bersama Bapak Chandra Afrizal, SE selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD pada hari Rabu, 18 Januari 2023 yang mengatakan bahwa:

Untuk saat ini, kami melakukan sosialisasi 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap kecamatan yang ada, total ada 11 kecamatan di Tanjab Timur ini, namun untuk tahun 2023 ini tidak dianggarkan lagi untuk sosialisasi karena keterbatasan dana dan tingkat kerawannya sudah cukup berkurang dan juga menurut hasil evaluasi kami kesadaran masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar itu juga sudah mulai berkurang dengan adanya tindakan hukum yang ditempuh pihak kepolisian.

Jadwal kegiatan sosialisasi pada tahun 2018-2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Waktu Kegiatan (Bulan)	
		2018	2019
1	Mendahara	Januari	Januari
2	Mendahara Ulu	Januari	Januari
3	Geragai	Februari	Februari
4	Dendang	Februari	Februari
5	MuaraSabak Barat	Maret	Maret
6	MuaraSabak Timur	Maret	Maret
7	Kuala Jambi	April	April
8	RantauRasau	April	April
9	Berbak	Mei	April
10	Nipah Panjang	November	November
11	Sadu	November	November

Sumber: BPBD Kab. TanjungJabung Timur, 2023

2. Pembentukan MPA

Pembentukan MPA yang didasari pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sebutan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sudah dilakukan walaupun masih belum merata diseluruh desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena kendala anggaran.

Agenda patroli yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Bapak Indra Sakti Gunawan, SE selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu, 18 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa:

Ketika nanti sudah berakhir musim penghujan atau awal musim kemarau di tandai dengan informasi dari BMKG kami melaksanakan patroli rutin yang melibatkan anggota kami dan juga dari TNI dan Polri, biasanya kami melakukan patroli 3 kali dalam seminggu karena keterbatasan anggaran karena pastinya kami juga memberi uang saku ke mereka dengan tim 6 orang di setiap kecamatan atau bisa lebih sesuai keadaan.

Jumlah Destana yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tabel berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Destana
1.	Mendahara	9	3
2.	Mendahara Ulu	7	2
3.	Geragai	9	6
4.	Dendang	7	2
5.	MuaraSabak Barat	7	1
6.	MuaraSabak Timur	12	4
7.	Kuala Jambi	6	3
8.	RantauRasau	11	2
9.	Berbak	6	2
10.	Nipah Panjang	10	1
11.	Sadu	9	3
	Jumlah	93	29

Sumber: BPBD Kab. TanjungJabung Timur, 2023

3. Pembuatan Sekat Bakar

Pembuatan sekat bakar sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkerjasama dengan perusahaan yang ingin menggunakan lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberikan beberapa persyaratan untuk dipenuhi guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, namun masih ada perusahaan yang curi-curi membuka lahan dengan cara dibakar dengan cara membayar warga sekitar.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh korporasi atau perusahaan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembuatan izin penggunaan lahan menurut Bapak Indra Sakti Gunawan, SE selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu, 18 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa:

Mereka sebelum mendapat izin harus ada rekomendasi dari BPBD dengan ketentuan lahannya tidak pernah terbakar, yang kedua mereka harus punya regu pemadam karhutla minimal 10 orang, yang ketiga mereka harus punya mesin pemadam, yang keempat mereka harus punya menara pantau dan mereka wajib membuat embung persediaan air ataupun sekat kanal setelah itu baru rekomendasi dari kami keluar untuk izin mereka, kami juga melakukan pengecekan tiap tahun apakah persyaratan tersebut masih berfungsi atau tidak.

4. Penyiapan Sarana dan Prasarana

Penyiapan sarana dan prasarana untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, jumlah mesin dan selang yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana sudah dapat dikatakan cukup dan juga ada beberapa mesin dan selang yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan, sudah meratanya area patroli disekitar pemukiman, namun masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum ada seperti mobil tangki air dan titik sumber air yang digunakan untuk pemadaman dan akses jika kebakaran terjadi di dalam hutan yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Berikut adalah inventaris alat pemadam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Pemadam	5 Unit
2	Selang 2.5 Inchi	48 Rol
	Selang 1.5 Inchi	16 Rol
3	Flexibel Tangki 1500 Galon	1 Unit
4	Trailer Tangki Air	1 Unit
5	Genset	3 Unit
6	GPS	2 Unit
7	Handy Talky	10 Unit
8	Velt bed	25 Unit
9	Sinso	1 Buah
10	Tenda Pengungsi	1 Unit
11	Tenda Keluarga	12 Unit
12	Senter	4 Buah

Sumber: BPBD Kab. TanjungJabung Timur,2023

Kesiapan transportasi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Bapak Indra Sakti Gunawan, SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu, 18 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa:

Alhamdulillah untuk alat transportasi kita terbilang cukup, kita ada speedboat polliterline yang kita simpan di pelabuhan muara sabak, kita ada 3 mobil rescue dan ada 7 unit kendaraan roda dua, untuk kendaraan ini kami menganggap sudah mencukupi dalam upaya penanggulangan bencana karhutla.

Berikut adalah daftar alat transportasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Operasional	3 Unit
2	Motor	7 Unit
3	Boat	1 Unit

BPBD Kab. TanjungJabung Timur,2023

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh tangan manusia, oleh karena itu upaya pencegahan dan mitigasi yang paling baik berasal dari manusia itu sendiri, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan jumlah hutan dan lahan yang terbakar, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah menerapkan beberapa peraturan dan sanksi bagi mereka yang melanggar ataupun melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar baik tersangka perorangan ataupun perusahaan.

Penelitian ini menggunakan konsep mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan didukung oleh kegiatan mitigasi dalam buku panduan mitigasi kebakaran hutan dan lahan oleh Denni Susanto,dkk 2018 sehingga penelitian ini mendapatkan pedoman kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan dapat digunakan sebagai pengembangan penelitian sebelumnya.

Berbedadaripenelitiansebelumnya yang menggunakanbentukkerjasamadenganperusahaandalammitigasikebakaranhutan dan lahan(Sitorus & Hidayat, 2020) dan bentukkoordinasiantar Lembaga pemerintah(Budiningsih, 2017)sertaanalisisjaraktempuhmenggunakanaplikasi GIS(Rizki Sahputra , Sigit Sutikno, 2017) dan analisisdistribusihuuntukmendeteksisumberapi(Handayani & Rustan, 2020)sertapenggunaanstrategi yang sesuaiuntukmencegahkebakaranhutan(Kumalawati et al., 2019), penelitianiniberfokus pada instansipemerintahyaitu Badan PenanggulanganBencana Daerah dalammengambiltindakanmitigasikebakaranhutan dan lahan.

IV. KESIMPULAN

1. Mitigasi Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang peneliti gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yaitu: Sosialisasi, Pembentukan MPA, Pembuatan Sekat Bakar dan Penyiapan Sarana dan Prasarana yang semuanya sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator dari tiap kegiatan yang digunakan yang peneliti jabarkan di hasil dan pembahasan. Upaya sosialisasi kebakaran hutan dan lahan yang

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah pernah dilakukan namun sempat terhenti dikarenakan pandemi Covid-19 membatasi ruang kumpul untuk sosialisasi dan alokasi anggaran lebih diprioritaskan ke arah penanganan Covid-19, dan untuk Pembentukan MPA yang didasari pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sebutan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sudah dilakukan walaupun masih belum merata diseluruh desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena kendala anggaran. Selanjutnya dalam pembuatan sekat bakar sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkerjasama dengan perusahaan yang ingin menggunakan lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberikan beberapa persyaratan untuk dipenuhi guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, namun masih ada perusahaan yang curi-curi membuka lahan dengan cara dibakar dengan cara membayar warga sekitar. Dan yang terakhir adalah penyiapan sarana dan prasarana untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, jumlah mesin dan selang yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana sudah dapat dikatakan cukup dan juga ada beberapa mesin dan selang yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan, sudah meratanya area patroli disekitar pemukiman, namun masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum ada seperti mobil tangki air dan titik sumber air yang digunakan untuk pemadaman dan akses jika kebakaran terjadi di dalam hutan yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan.

2. Adanya beberapa faktor penghambat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti: kurangnya alokasi anggaran pada bagian pencegahan, keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pemadaman dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pemadaman jika ditemukan titik api disekitar. Sehingga untuk mengatasi hal ini dibutuhkan prioritas alokasi pada pencegahan dan mitigasi, melengkapi sarana dan prasarana penting dan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitiansertakelengkapaninformasi di lokasipenelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mitigasikebakaranhutan dan lahan di KabupatenTanjungJabung Timur Provinsi Jambi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada KepalaPelaksana Badan Penanggulanganbencana Daerah KabupatenTanjungJabung Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiningsih, K. (2017). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal analisis kebijakan kehutanan*, 14(2), 165–186.
- Handayani, I., &Rustan. (2020). Analisis distribusi suhu maksimum dan kelembaban rata-rata untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (studi kasus: kabupaten muaro jambi). *Jurnal ilmu fisika dan pembelajarannya*, 4(1), 16–20.

Kumalawati, R., Nasruddin, & Elisabeth. (2019). Strategi penanganan hotspot untuk mencegah kebakaran di kabupaten barito kuala Kalimantan Selatan. *Prosiding seminar nasional lingkungan lahan basah*, 4(april).

Rizki sahaputra , Sigit Sutikno, a. S. (2017). Mitigasi bencana kebakaran lahan gambut berdasarkan metode network analysis berbasis GIS (studi kasus: pulau bengkalis). *Jurnal fteknik*, 4(2).

Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020). Strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat di sungai pakning kabupaten bengkalis provinsi riau. *International Conference Communication and Social Sciences (ICCOMSOS)*, 1(1), 23–29. <http://sipongi.menlhk.go.id>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (hal. 137). Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 18.

